

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program MADAGASKAR (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran) dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada ketidakjelasan mekanisme transmisi pesan dan ketiadaan SOP, meskipun keberlangsungan program tertolong oleh disposisi positif dari para pelaksana di lapangan. Berikut kesimpulan hasil analisa terhadap “Implementasi Program MADAGASKAR (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran) dalam Pencegahan Kebakaran di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya:

1. Pada faktor komunikasi, pelaksanaan program MADAGASKAR di Kelurahan gading Kecamatan Tambaksari menunjukkan bahwa komunikasi program masih terbatas pada tiga aspek utama. Dari segi transmisi, penyampaian kebijakan banyak mengandalkan sosialisasi tatap muka, namun intensitasnya tidak merata: beberapa kelurahan menerima pelatihan rutin, sebagian hanya mendapat sosialisasi tanpa jadwal jelas, dan ada yang hampir tidak pernah dijangkau. Di sisi lain, pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya menilai surat-menyurat dan integrasi ke Kader Surabaya Hebat sudah cukup, sehingga

terjadi miss-match dengan persepsi kader yang membutuhkan pertemuan tatap muka yang lebih sering dan substansial.

Dari sisi kejelasan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada SOP tertulis bagi kader MADAGASKAR, sehingga tugas dan langkah mitigasi tidak terstandar. Kader bergantung pada ingatan verbal, sehingga pemahaman dan praktik kerja menjadi berbeda-beda antar individu. Selain itu, minimnya atau tidak adanya media visual dan tertulis (modul, leaflet, infografis) membuat pesan mitigasi kebakaran sulit menempel dan dipahami secara tepat oleh masyarakat.

Dalam dimensi konsistensi, temuan wawancara mengungkap bahwa frekuensi, bentuk, dan kedalaman sosialisasi berbeda-beda antar kelurahan. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat, sekaligus ketidakseragaman materi dan metode penyampaian. Tanpa pedoman baku materi dan pelatihan, komunikasi program MADAGASKAR di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari dinilai masih terfragmentasi dan kurang selaras antar wilayah.

2. Di faktor Sumber daya dalam pelaksanaan Program MADAGASKAR di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari dipengaruhi oleh tiga dimensi sumber daya: staff (personel), informasi, dan kewenangan.

Dari sisi staff, Kader Surabaya Hebat (KSH), perangkat RW, dan kelurahan menjadi tulang punggung pelaksana sosialisasi, namun keterbatasan mereka sebagai relawan non-teknis (bukan personel Damkar) menjadi hambatan ketika tidak dibarengi pelatihan lanjutan. Intensitas keterlibatan dan pelatihan KSH juga

tidak merata antar-RW, sehingga ada wilayah yang aktif dan ada yang bergantung pada inisiatif individu.

Dari sisi informasi, program MADAGASKAR masih minim pedoman tertulis dan SOP bagi kader. Sosialisasi banyak disampaikan secara verbal tanpa modul atau materi visual, sehingga isi pesan cenderung tidak terstandar dan rentan terdistorsi. Ketiadaan media visual dan dokumentasi kegiatan (catatan, evaluasi) juga mengurangi kualitas sosialisasi dan mempersulit monitoring serta pembelajaran berkelanjutan.

Dari sisi kewenangan, terjadi distorsi pemahaman peran kader. Mayoritas kader memosisikan diri sebagai penerima instruksi pasif, bukan agen aktif yang berhak menginisiasi kolaborasi dengan Damkar. Kecuali di Kelurahan Dukuh Setro, inisiatif kader yang aktif lebih banyak muncul karena relasi personal dengan pihak Damkar, bukan karena adanya kewenangan formal yang jelas. Tanpa distribusi kewenangan yang merata dan mandat eksplisit, fungsi kader sebagai inisiator sosialisasi dan kolaborator mitigasi di tingkat akar rumput menjadi lemah dan tidak konsisten.

3. Pada faktor disposisi efektivitas Program MADAGASKAR di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari ditopang oleh tiga hal: efek disposisi kader, pengaturan birokrasi, dan sistem insentif.

Dari sisi efek disposisi, kader Kader Surabaya Hebat (KSH) di berbagai kelurahan menunjukkan motivasi intrinsik yang kuat untuk mencegah dan menangani risiko kebakaran, baik karena dorongan pencegahan bencana besar maupun keinginan menjaga keamanan lingkungan. Apresiasi positif warga dan rasa “bermakna” dalam

menjalankan tugas memperkuat sikap dan komitmen kader, sehingga mereka tetap bergerak meski dukungan struktural terbatas. Disposisi seperti ini berfungsi sebagai penopang utama yang menjaga keberlangsungan program, meskipun pelaksanaannya bersifat informal dan bervariasi.

Dari sisi pengaturan birokrasi, program MADAGASKAR menjalin kemitraan antara Dinas Pemadam Kebakaran, kelurahan/RW, dan KSH, namun struktur ini masih rapuh karena tidak ada SOP tertulis dan kewenangan kader yang jelas. Koordinasi banyak bergantung pada inisiatif personal dan hubungan informal, sehingga terjadi ambiguitas peran dan disparitas perlakuan antar-kelurahan. Ketersediaan fasilitas mitigasi seperti APAR juga tidak terstandar, sehingga daerah yang minim dukungan fisik menjadi lebih rentan, sekalipun kader dan warganya memiliki semangat tinggi.

Dari sisi insentif, terdapat ketimpangan pemahaman antara penyelenggara dan kader. Penyelenggara menganggap honorarium KSH sudah mencakup semua tugas termasuk MADAGASKAR, sedangkan kader sering memandang keterlibatan mereka sebagai beban tambahan tanpa dukungan dana dan fasilitas yang jelas. Meski demikian, antusiasme kader tetap tinggi karena didorong kesadaran akan urgensi keselamatan lingkungan, bukan kalkulasi finansial. Apresiasi sosial dari warga berperan sebagai insentif non-material yang menguatkan semangat kader, membentuk siklus penguatan positif meskipun sistem insentif formal masih lemah dan belum tersosialisasikan dengan baik.

4. Pada faktor Struktur birokrasi Program MADAGASKAR di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari memiliki dua karakteristik utama: ketiadaan SOP tertulis dan fragmentasi peran yang belum sepenuhnya terlembagakan.

Program MADAGASKAR tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus bagi kader, karena pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya menilai tugas kader relatif sederhana (sosialisasi, monitoring, dan pelaporan dasar). Dari hasil wawancara, sebagian besar pihak menyatakan bahwa ketiadaan SOP tidak menjadi hambatan besar karena program masih berjalan baik melalui pelatihan, arahan lisan, dan koordinasi antar-aktor. Namun, tanpa SOP tertulis, pelaksanaan program sangat bergantung pada pemahaman individu, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan ketidakkonsistenan antar-kelurahan.

Struktur birokrasi MADAGASKAR menunjukkan pembagian peran yang jelas: Dinas Pemadam Kebakaran sebagai pembina dan pendamping utama, Kasi Kesra kelurahan sebagai koordinator, dan kader sebagai pelaksana di lapangan. Secara fungsional, pembagian peran ini berjalan cukup baik dan didukung komunikasi yang intensif. Akan tetapi, pembagian tugas tersebut belum dituangkan secara formal dalam surat tugas, SOP, atau dokumen internal lainnya, sehingga fragmentasi masih bersifat informal. Ketergantungan pada koordinasi informal berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan tumpang tindih tugas, terutama jika terjadi pergantian personel.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi MADAGASKAR di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari dinilai cukup efektif dalam jangka pendek, namun tetap memerlukan penguatan formal dengan penyusunan SOP sederhana, dokumentasi

pembagian tugas, dan alur koordinasi yang jelas agar implementasi program lebih konsisten, berkelanjutan, dan tidak mudah terganggu oleh perubahan di lapangan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sangat diharapkan untuk meningkatkan struktur birokrasi melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami, Mempertegas batasan peran, tugas, dan wewenang kader serta elemen pelaksana lainnya dalam program MADAGASKAR, Mengurangi ketergantungan pada akses informal dengan memberikan legitimasi formal kepada kader dalam pelaksanaan mitigasi kebakaran di lapangan, Membuat sistem tertulis yang mengatur fragmentasi kewenangan antaraktor agar koordinasi program lebih terarah dan efektif.

Bagi Penelitian Selanjutnya diharapkan untuk memperluas locus penelitian ke kecamatan lain di Kota Surabaya dengan karakteristik kepadatan penduduk dan tipologi permukiman yang berbeda, Menguji validitas eksternal temuan penelitian untuk mengetahui apakah hambatan birokratis dan ketidakjelasan SOP bersifat sistemik atau kasuistik, Menggunakan pendekatan metode campuran (mixed-methods) agar efektivitas program dapat dianalisis secara lebih komprehensif, Meneliti hubungan antara tingkat pemahaman kader terhadap SOP dengan kecepatan respons penanganan dini kebakaran, Memfokuskan analisis pada perspektif masyarakat umum (non-kader) untuk mengetahui tingkat penyerapan informasi mitigasi kebakaran di masyarakat.